

ABSTRACT

This thesis aims to explain the influence of The Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) to countries' compliance, especially the research field of Indonesia. Earlier studies of the initiative have found that public endorsement of the initiative does not improve the corruption perception levels in countries that have joined, and in some cases EITI countries seems to be worse-off than non-EITI countries. Yet Indonesia has shown its eagerness to be a candidate of EITI and has been active in the initiation process ever since 2003. The country continued its progress until its official recognition as a compliant of EITI in 2014. This thesis seeks to explain the efforts of Indonesia's compliance from the perspective of the EITI's influence as a regime. The analysis of EITI's power to influence countries, especially Indonesia, will be the bridge to answer the research question. In doing so, this thesis uses the structural power analysis by Andrej Pustovitovskij and Jan-Frederik Kremer. Structural power analysis focuses to see the exchange of goods (resources) from EITI as an actor to Indonesia with its needs as another actor. After the analysis of goods-needs, the concept will help to analyze the relations of EITI, Indonesia, and Outside Options (OO). The findings will demonstrate that EITI influences Indonesia to voluntarily report themselves in compliance by the existence of its 'structural power'. Structural power is shown by three kinds of goods: material, positional, and ideational. Material goods are shown by the EITI engagement to financial institutions such as The World Bank. Positional goods are shown by the reputation offered by EITI as the main reference of governments and industries in their decision-making process. Ideational goods are shown by the ideational power of global good governance. Meanwhile, there is no other provider that is as strong as EITI. On the other hand, there are many Outside Options for EITI, as there are lots of other extractive resource countries who also need the recognition of EITI, making EITI's structural power stronger.

Keywords: EITI, Indonesia, compliance, extractive industry, goods, needs, outside option, structural power

ABSTRAKSI

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) terhadap *compliance* negara, dengan menganalisis kasus dari Indonesia. Penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa dukungan publik terhadap inisiasi ini tidak meningkatkan persepsi level korupsi negara yang mengikutinya, bahkan dalam beberapa kasus negara yang mengikuti standar EITI dipandang memiliki level korupsi yang lebih buruk dibandingkan dengan negara yang tidak mengikuti standar EITI. Namun demikian Indonesia menjadi salah satu negara yang menunjukkan keinginan kuatnya untuk menjadi salah satu *compliant*. Indonesia telah aktif bahkan sejak proses inisiasi EITI pada tahun 2003. Pada tahun 2014 akhirnya Indonesia ditetapkan sebagai salah satu *compliant* dari EITI. Skripsi ini kemudian akan menjelaskan lebih lanjut mengenai usaha Indonesia untuk mengikuti standar EITI dengan melihat pengaruh EITI sebagai suatu rezim. Analisis mengenai *power* yang dimiliki EITI untuk mempengaruhi negara-negara utamanya Indonesia akan menjembatani penulis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Skripsi ini akan menggunakan analisis *structural power* oleh Andrej Pustovitovskij dan Jan-Frederik Kremer. Analisis *structural power* akan berfokus untuk melihat pertukaran *goods* (sumber daya) dari EITI sebagai suatu aktor kepada Indonesia dengan kebutuhannya sebagai aktor lain. Setelah analisis tersebut, konsep yang sama akan membantu penulis untuk menganalisis relasi EITI, Indonesia, dan *Outside Option* (OO). Temuan dari skripsi ini akan menjelaskan bahwa EITI menarik Indonesia untuk secara sukarela mengikuti standarnya karena adanya '*structural power*'. *Structural power* ditunjukkan dengan adanya tiga *goods* yaitu yang bersifat materi, posisi, dan ide. *Goods* yang bersifat materi ditunjukkan dengan hubungan EITI terhadap institusi-institusi keuangan seperti Bank Dunia. *Goods* yang bersifat posisi ditunjukkan dengan reputasi yang ditawarkan oleh EITI sebagai referensi utama pemerintah dan industri ekstraktif dalam pengambilan keputusan. *Goods* yang bersifat ide ditunjukkan melalui adanya *ideational power* dari *good governance*. Di sisi lain, tidak ada rezim industri ekstraktif sekuat EITI sementara banyak negara-negara industri ekstraktif yang membutuhkan pengakuan EITI dan berperan sebagai *Outside Option* (OO). Dengan demikian *structural power* yang dimiliki oleh EITI menjadi lebih kuat.

Kata Kunci: EITI, Indonesia, *compliance*, *extractive industry*, *goods*, *needs*, *outside option*, *structural power*